



SIARAN PRESS

Untuk di rilis segera

PBB Berdiri Dalam Solidaritas Dengan Indonesia Saat Kasus COVID-19 dan Kematian Meningkat

JAKARTA, 9 JULI 2021 – Awal pekan ini, [Sekretaris-Jenderal PBB Antonio Guterres](#) mengumumkan bahwa di seluruh dunia, 4 juta orang telah meninggal karena COVID-19. Pada hari yang sama, Indonesia, negara Asia Tenggara yang dilanda pandemi cukup parah, mencatat kenaikan tertinggi dalam infeksi dan kematian harian. Dua tonggak sejarah yang suram dan bersamaan itu menggarisbawahi fakta bahwa bahkan ketika beberapa negara bergerak untuk melonggarkan pembatasan pergerakan dan pertemuan sosial, pandemi belum berakhir. Faktanya, upaya global yang berkelanjutan dan terpadu masih sangat diperlukan untuk membatasi jumlah korban tragis COVID-19, dan menahan penyebaran varian kekhawatiran.

“Kami sangat khawatir dengan peningkatan tajam kasus dan kematian COVID-19 di Indonesia, didorong oleh varian Delta yang sangat mudah menular” ucap Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliard. “Krisis yang sedang kami tangani di sini berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada dari kita yang dilindungi sampai kita semua terlindungi.”

Hingga 9 Juli, Indonesia telah resmi mencatat 64.631 kematian akibat COVID-19. Sejak Juni, setidaknya 30 dokter telah meninggal, menurut Ikatan Dokter Indonesia. Menanggapi beban kasus yang meningkat, Presiden Indonesia Joko Widodo pada 1 Juli mengumumkan pembatasan baru pada pergerakan di pulau Jawa dan pulau Bali yang paling padat penduduknya di Indonesia. Aturan, yang mulai berlaku pada 3 Juli, membatasi pertemuan publik, mengurangi jam buka, dan mengharuskan sebagian besar orang untuk bekerja dari rumah, di antara langkah-langkah lain yang dirancang untuk memperlambat penyebaran COVID-19.

PBB di Indonesia mendukung penuh langkah-langkah ini, yang sangat penting untuk membatasi penularan COVID-19, mengendalikan peredaran varian Delta, dan mengurangi kematian. Namun para ahli memperingatkan bahwa varian Delta menimbulkan ancaman di luar Jawa dan Bali. “Semua wilayah negara harus memastikan implementasi dan pemantauan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang tepat waktu, termasuk pembatasan pergerakan,” tulis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporannya di 7 Juli. “Provinsi lain harus belajar dari pelajaran Jakarta dan Jawa untuk secara proaktif menerapkan tindakan darurat terlebih dahulu, sebelum situasi menjadi tidak terkendali,” tulis laporan situasi.

Sejak COVID-19 muncul sebagai ancaman kesehatan masyarakat tahun lalu, Tim Kemanusiaan PBB (HCT) di Indonesia telah mendukung semua aspek respons yang dipimpin pemerintah terhadap krisis tersebut. HCT menggabungkan badan-badan PBB serta aktor kemanusiaan lainnya seperti Masyarakat Palang Merah Indonesia (PMI), Federasi Palang Merah Internasional, dan banyak LSM nasional dan internasional. Rencana Aksi HCT mencakup penyediaan peralatan medis dan test kit untuk mendukung sistem kesehatan Indonesia; membantu kampanye vaksinasi nasional di lapangan melalui peningkatan kapasitas dan saran teknis; memerangi informasi yang salah dan memberikan pesan kesehatan

masyarakat yang akurat; dan mengisolasi sebagian masyarakat yang paling rentan dari dampak sosial dan ekonomi pandemi.

Beberapa dari intervensi ini telah ditingkatkan dalam menanggapi beban kasus yang meningkat. Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 8,4 juta dosis vaksin AstraZeneca COVID-19 melalui fasilitas COVAX, mekanisme global untuk mempromosikan akses yang lebih adil terhadap vaksinasi, dan tambahan 6,3 juta dosis vaksin lainnya diharapkan segera tiba. Hingga 8 Juli, Indonesia telah memberikan lebih dari 46,8 juta dosis vaksin COVID-19 dengan dukungan badan-badan PBB termasuk WHO, UNICEF, dan UNDP. Namun, peluncuran vaksinasi perlu dipercepat, kata WHO, terutama untuk populasi yang lebih tua yang memiliki cakupan rendah secara konsisten dan untuk kelompok rentan lainnya.

Bahkan, tindakan mendesak diperlukan secara nasional untuk menanggapi lonjakan kasus, kematian, dan tingkat hunian tempat tidur rumah sakit. Tindakan ini harus mencakup penerapan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan masyarakat (PHSM) yang ketat seperti pembatasan pergerakan yang terbukti efektif di India dan negara-negara lain yang menghadapi lonjakan COVID-19. Pengujian juga harus ditingkatkan.

Lebih dari setengah dari 34 provinsi di Indonesia saat ini melakukan tes pada tingkat di bawah patokan yang direkomendasikan WHO yaitu 1 tes per 100 orang per minggu, yang membuat mengisolasi kasus yang dikonfirmasi dan pelacakan kontak menjadi sulit. WHO juga memperingatkan bahwa rumah sakit nasional perlu dilengkapi untuk menangani masuknya pasien COVID-19: ini termasuk memastikan ketersediaan ruang isolasi, peralatan medis, dan oksigen. Pada 4 Juli, Gubernur Jawa Tengah mengaktifkan Satuan Tugas Oksigen sebagai tanggapan atas kekhawatiran kekurangan oksigen di beberapa provinsi. PBB memfasilitasi diskusi dengan badan-badan bilateral untuk potensi pengadaan oksigen dan pasokan medis penyelamat nyawa lainnya.

Bagi PBB, memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan dilindungi dari dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi adalah prioritas utama. Untuk menyebutkan beberapa intervensi, UN Women dan UNFPA telah bekerja untuk mengarusutamakan gender dan kekerasan berbasis gender dalam tanggap darurat, termasuk langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan selama pandemi. UNICEF dan WHO bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan mitra seperti Perhimpunan Dokter Anak Indonesia untuk lebih menangani epidemiologi COVID-19 pada anak-anak. UNODC telah memberikan bantuan berkelanjutan kepada penjara, fasilitas perawatan narkoba, dan lembaga penegak hukum. Dan Indonesia juga telah memvaksinasi lebih dari 1.300 pengungsi, dengan dukungan dari IOM dan UNHCR. Jumlah itu termasuk 81 pengungsi Rohingya yang menerima vaksinasi COVID-19 hanya beberapa hari setelah nelayan setempat menemukan kapal mereka terdampar di lepas pantai Aceh Timur.

Seiring Indonesia melanjutkan perjuangannya untuk mengurangi krisis, PBB tetap teguh dalam mendukung pemerintah dan warga negara Indonesia. Dalam sebuah video berbahasa Indonesia yang dirilis pada 9 Juli, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliard menyatakan solidaritasnya dengan masyarakat Indonesia, “apakah Anda berjuang dengan kehilangan orang yang dicintai, atau dengan kesulitan ekonomi, atau dengan kesepian jarak fisik.” Dia melanjutkan dalam pesan video: “Saya ingin mengulangi rasa terima kasih PBB yang mendalam kepada petugas kesehatan garis depan yang bekerja sepanjang waktu untuk menjaga kita semua tetap aman. Ingat: badai ini akan berlalu. Dan kepedulian kita satu sama lain adalah apa yang memungkinkan kita untuk melewatinya.”

Kontak:

Andri Suryo, Pusat Informasi PBB (UNIC) Jakarta

E: andri.suryo@un.org | M: 0811-8456-709 | indonesia.un.org

Ikuti kami di Twitter, Instagram, dan Facebook: [@UNinIndonesia](https://www.instagram.com/UNinIndonesia)